



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTANSINGINGI

Yosi Nopita Sari

Fakultas Ilmu Sosial, Akuntansi, Universitas Islam Kuantan Singingi, Teluk Kuantan

Email: yosinovita07@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is accrual based government accounting standards, one of which is information technology at the one stop integrated service investment office and the singing district workforce is adequate. This is know from the availability of computers, laptops, printers and other hardware, with a sufficient number of accounting department. The one stop integrated service investment office and the kuantan singing district workforce have not yet conducted perpetual recording, but use the fhisical method, for other reasons in government regulation number 71 of 2010 concerning government accounting standars still provides room for choosing physical methods in inventory recording and application system financial management that does not support perpetual inventory.

The results of this study are the application of accrual based government accounting standards in the preparation of the operational reports of the one stop integrated service investment service and the kuantan singing district workforce is in accordance with government regulation number 71 of 2010 concerning government accounting standards.

Keywords: *accrual based government accounting standars, government regulation number 71 of 2010*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal salah satunya adalah teknologi informasi, teknologi informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sudah memadai. Hal tersebut diketahui dari tersedianya komputer, laptop, printer dan perangkat keras lainnya, dengan jumlah yang cukup bagian Akuntansi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi belum melakukan pencatatan perpetual, tetapi menggunakan metode Fisik, dengan alasan kesulitan dalam pencatatan menggunakan Perpetual, alasan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah masih memberi ruang untuk memilih metode fisik dalam pencatatan persediaanya dan system aplikasi pengelolaan keuangan yang tidak mendukung pencatatan persediaan dengan perpetual. Hasil penelitian adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata Kunci: *SAP, Basis Akruaal, PP Nomor 71 Tahun 2010*



1. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan Negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. setelah undang-undang tersebut, bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus menerus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar akuntansi pemerintah (Mardiasmo : 17). Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam berikut: “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana maksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5(lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan pp nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan pp nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah



sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di Indonesia. SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan operasional pemerintah.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif komparatif. Deskriptif adalah membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan tabulasikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Sedangkan komparatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menyesuaikan Laporan Operasional Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apakah telah sesuai.

1.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2008:163). Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020.

2. Observasi

Adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008:162). Observasi dalam penelitian ini berupa peninjauan



awal dengan melakukan observasi dan menganalisa dokumen Laporan Operasional Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 2020.

3. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya Jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan Sugiyono (2008:162).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada key informan yang berhubungan langsung dengan Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Dinas ,Kasubbag Keuangan dan Staf Bagian Akuntansi.

4. Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu pegawai yang menyusun Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Staf Bidang Akuntansi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif.

1. Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan ketenangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi Sugiyono (2009:8).
2. Metode komparatif merupakan metode analisa data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun Laporan Operasional. Dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut Sugiyono (2009:8).
3. Menganalisis hasil Wawancara dari 3 (Tiga) narasumber untuk mengakses atau memperkuat kesimpulan terkait hasil penelitian tentang belum/sudah sesuai nya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh.

1.3.1 Uji Validitas

Validitas penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki konotasi yang sama dengan penelitian kualitatif, tidak pula sejajar dengan Reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun generalisasi (yang berarti validitas eksterbal atau hasil penelitian yang dapat yang dapat diterapkan. Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

apakah penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum.



Menurut Sugiyono (2014) terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dan sampel tersebut diambil.

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

2. Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah otonom adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembar Negara tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968) dengan Ibukota Teluk Kuantan.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000-10 00 Lintang Selatan dan 1010 02- 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas- batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi

Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur dengan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 15 (lima belas)

Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Cerenti
2. Kecamatan Inuman
3. Kecamatan Kuantan Hilir
4. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
5. Kecamatan Pangean
6. Kecamatan Logas Tanah Darat
7. Kecamatan Benai
8. Kecamatan Sentajo Raya
9. Kecamatan Kuantan Tengah
10. Kecamatan Gunung Toar
11. Kecamatan Kuantan Mudik
12. Kecamatan Hulu Kuantan
13. Kecamatan Pucuk Rantau
14. Kecamatan Singingi
15. Kecamatan Singingi Hilir



4.1.2 Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terlihat bahwa Beban kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi cukup luas meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan, Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi maka Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif Pelayanan Prima dan Tenaga Kerja yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
2. Mengembangkan sistem informasi di Bidang Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja yang akurat melalui teknologi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aparatur yang profesional, jujur dan akuntabel.
4. Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan Investasi.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna peningkatan peluang investasi.
6. Meningkatkan pengenalan produk dan komoditi unggulan daerah.
7. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan.
8. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja.
9. Mewujudkan hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Seksi Data dan Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Pelayanan Pengendalian Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. Seksi Pendaftaran
2. Seksi Verifikasi dan Survei
3. Seksi Pengolahan dan Penerbitan
5. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan, membawahi:
 1. Seksi Informasi Layanan
 2. Seksi Pengolahan Data Pelaporan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan
6. Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan
 2. Seksi Penempatan
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
7. Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI JSTK), membawahi:
 1. Seksi Syarat Kerja
 2. Seksi Hubungan Industrial
 3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja



Tabel 4.2

**Perbandingan PP 71 Tahun 2010 dengan Laporan Operasional
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Unsur	PP 71	Laporan Operasional DPMPTSPK (Temuan Lapangan)	Sesuai/ Belum
1.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Operasional (LO)	Paragraph 11 Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan komparatif . laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dala catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama datu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka -angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan .	Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan komparatif . laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama datu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka -angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai
2	Surplus/Defisit LO	Paragraph 14 Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahab, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar	Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahab, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai
3	Entitas Pelaporan	-Paragraph 16 Entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, rincian lebih lanjut sumber pendapatan di sajikan pada catatan atas laporan keuangan -Paragraph 17 Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan kalsifikasi lain yang di persyaratkan menurut kerentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan	-Entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, rincian lebih lanjut sumber pendapatan di sajikan pada catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. -Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan kalsifikasi lain yang di	Sesuai



			persyaratkan menurut kerentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	
4	Pendapatan LO	-Paragraph 26 Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidakn, mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	-Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidakn, mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai
5	Beban	-Paragraph 40 Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uanga atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitaspelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. -Paragraph 41 Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban padaa periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibutuhkan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.	-Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uanga atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. - Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban padaa periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibutuhkan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai
6.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	-Paragraph 45 Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokan tersendiri dalam kegiatan operasional. -Paragraph 47 Selisih lebih/kurang antaran surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non opsional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.	- Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokan tersendiri dalam kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. - Selisih lebih/kurang antaran surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit	Sesuai



			dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	
7	Pos Luar Biasa	-Paragraf 48 Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. -Paragraf 50 Sifat dan jumlah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.	- Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. - Sifat dan jumlah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai
8	Surplus/defisit LO	-Paragraf 51 Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.	- Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Sesuai

Sumber :Analisa Data, 2022

4.3 Pembahasan

1. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Dalam penyusunan Laporan Operasional LO Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Pencatatan pendapatan LO Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah mencatat sesuai dengan aturan yang dituliskan dalam PSAP.

Kendala dalam menyusun Laporan Operasional-LO sama dengan kendala saat penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yaitu lebih pada lambatnya OPD dalam menyampaikan Laporan Operasional –LO OPD sehingga proses konsolidasi untuk penyusutan Laporan Operasional LO Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi juga menjadi terlambat. Selain dari itu kesalahan input belanja disistem oleh bendahara penerimaan OPD membuat proses verifikasi oleh Bidang Akuntansi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih lama karena OPD harus memperbaiki kesalahanpanginputan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa memang prosedur penyusunan Laporan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi bendahara mencatat dan menginput seluruh transaksi keuangan ke SIPKD , melalui akun bendahara kemudian PPK membuat jurnal dan menginput jurnal memorial pajak lalu disajikan dalam laporam keuangan OPD (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi maka berikut ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis Komparatif Laporan Operasional dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan Penelitian di atas diajukan saran sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi perlu mempertahankan prestasi yang telah diraih atau bahkan terus ditingkatkan lagi supaya terus tercipta tata kelola dengan baik terutama dibidang sektor publik dalam Penerapan Akuntansi Pemerintahan agar dalam pemeriksaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi bimbingan teknis, pelatihan dan bersosialisai sehubungan dengan Laporan Operasional yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi juga harus memperbaiki jaringan yang memperlambat penginputan laporan Operasional.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi penelitian yang sudah ada dengan menggunakan analisis-analisis yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M.,M.Kes Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti,S.I.P.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rina Andriani,SE.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Yul Emri Yulis,SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan kepada Penulis dalam menyusun Skripsi..
5. Ibu DiskhaMarzaweny,S.E.,MM Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan kepada Peneliti dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Mardansyah,S.Sos,MM selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

7. Ibu Kasrita, SE selaku Kasubbag Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Seluruh pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiyos, 2006. *Kamus Produksi dan Manajemen*. Jakarta : Citra Harta Prima
- Arikunto, suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020.
(22 Nopember 2021)
- Erlina, Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan : Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Skripsi

- Rivaldy Billy ,S Sifrif dan Warongan .2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Minahasa*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Langelo Friska, Saerang Elia Paul David dan Winylson. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang
- Prameswari Meyke.2018. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Kusuma Setiawati Ririz.2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi Universitas Jember.
- Pengemanan Ranuba dan Pinatik. 2015. *Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Niu, Karamoy dan Tangkuman.2014. *Analisis Persiapan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*.
- Ayu Weda dan Riharjo Budi Ikhwan Margareta.2015. *Analisis Kesiapan Intansi Pemerintah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Sitorus ,Kalangi dan Walandouw.2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.*

Satrio M.Dimas, Yuhertina Indrawati dan Hamzah Ardi. 2016. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang.*

Kariyoto. 2016. *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Malang dalam Mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.*

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.